



LKjIP 2024

Laporan Kinerja

Jln. Ipda Tut Harsono No. 53,
Kel Muja Muju. DI Yogyakarta 55165
Telp. 0274-552997
Fax. 0274-552998
Email. admin@pa-yogyakarta.net

LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

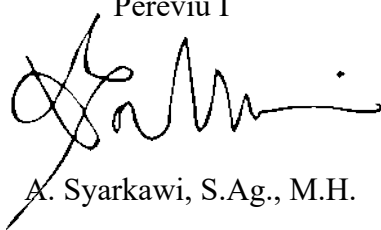
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

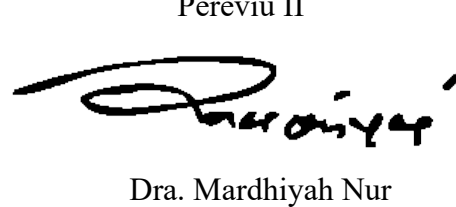
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Pereviu I

A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Pereviu II

Dra. Mardhiyah Nur

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
RIngkasan Eksekutif	iii
BAB I - Pendahuluan	1
BAB II - Perencanaan Kinerja	7
BAB III - Akuntabilitas Kinerja	8
BAB IV - Penutup	8
Lampiran	8

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Pengadilan Agama Yogyakarta, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2024 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan pencapaian yang sesuai. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2024 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun berikutnya.

Dengan selesainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2024 dan terselesaikannya LKjIP ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag dan Pimpinan PTA atas bimbingan dan arahannya serta semua pihak atas kerjasamanya yang baik. Kepada stakeholder, kami mohon maaf apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024 belum sesuai dengan harapan.



Yogyakarta, 23 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	99.38%	101.40%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98.35%	98.40%	100.05%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99.13%	99.38%	100.25%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	94.81%	105.34%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	40.31%	133.37%

RINGKASAN EKSEKUTIF



Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	109.84%	109.84%

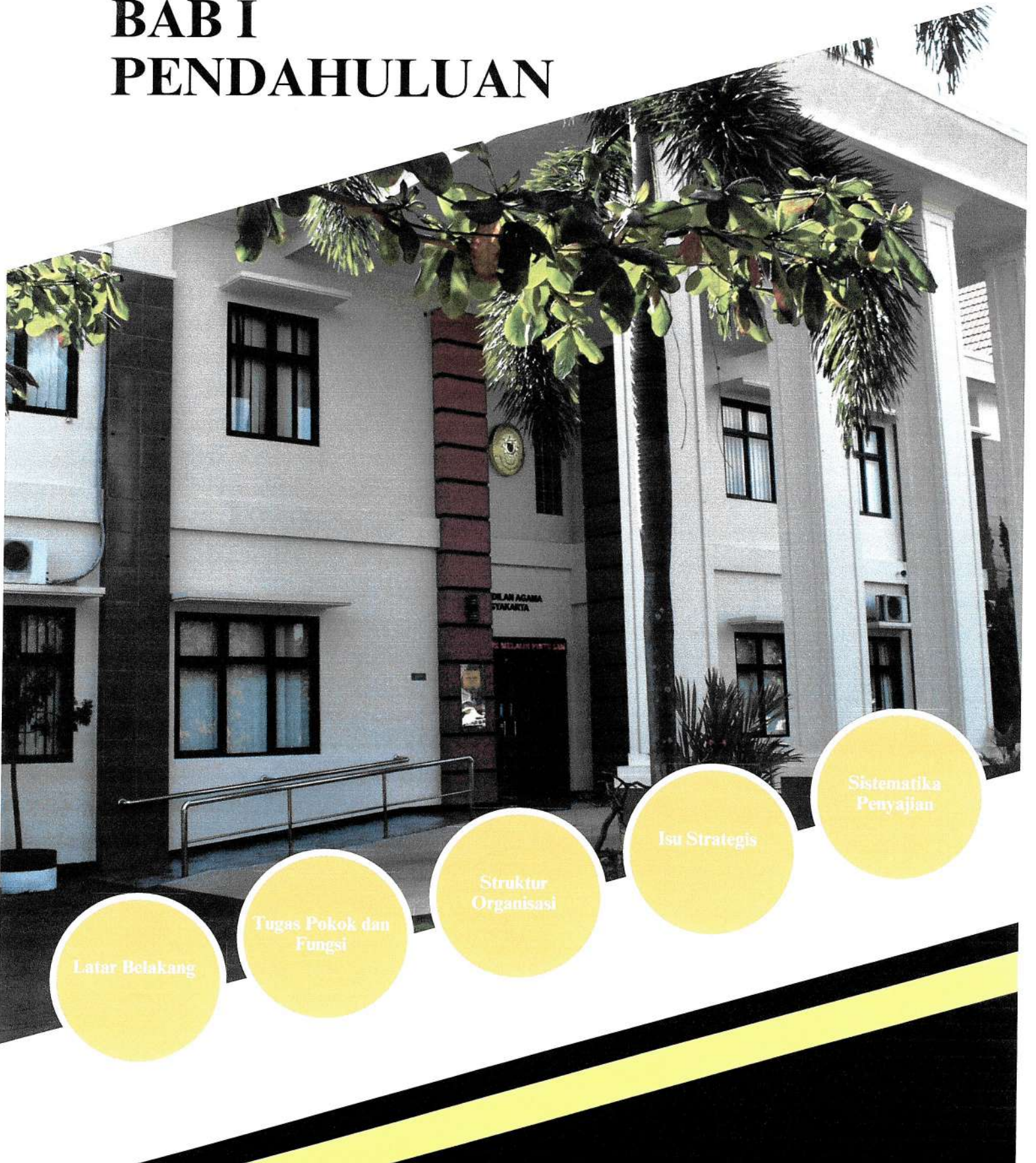
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%	98.97%	100.98%

Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian kinerja pejabat dan staf kepaniteraan.	100%	100%	100%
Persentase capaian kinerja pejabat dan staf kesekretariatan	100%	100%	100%

BAB I PENDAHULUAN



Latar Belakang

Tugas Pokok dan
Fungsi

Struktur
Organisasi

Isu Strategis

Sistematika
Penyajian

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sebuah Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung secara umum khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama hasil Reviu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.



Tugas Pokok dan Fungsi

⊕ Tugas Pokok

- Tugas pokok Pengadilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

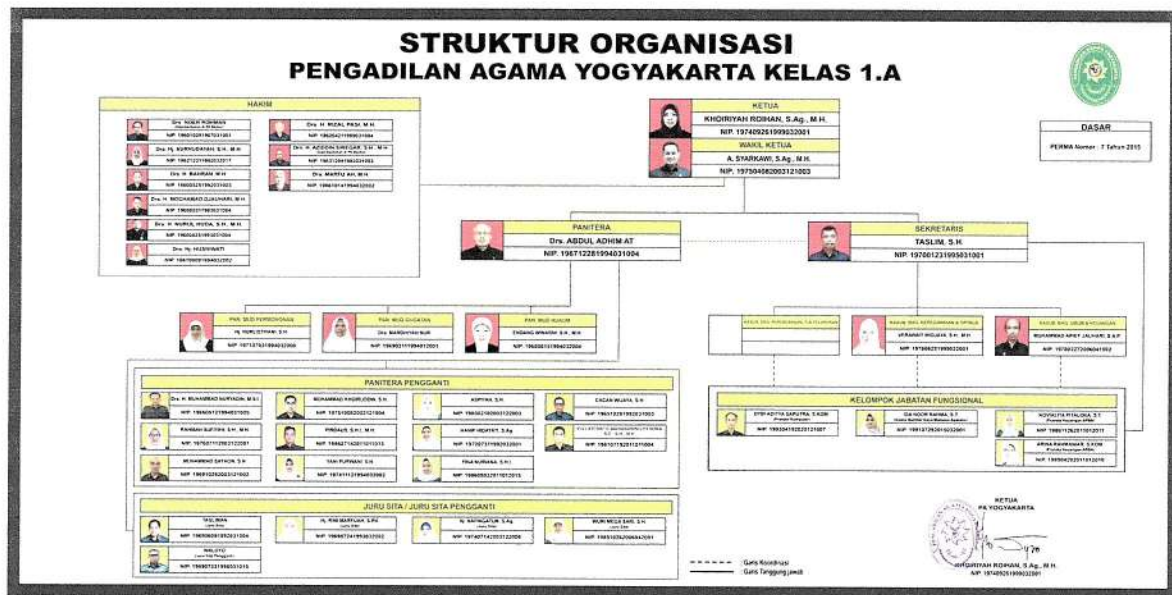
⊕ Fungsi

- Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya.
- Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara).
- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya



Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Isu Strategis

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, ditetapkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Oleh karena itu, hal ini menjadikan target penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta

Optimalisasi Manajemen Peradilan

Salah satu upaya Pengadilan Agama Yogyakarta untuk optimalisasi manajemen peradilan yaitu dengan target penerapan Sistem Manajemen Mutu Peradilan Agama melalui Zona Integritas setiap tahunnya

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Agama Yogyakarta yang patut untuk ditingkatkan meliputi optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur guna mendapatkan aparatur yang kompeten dalam bidangnya

Sarana dan Prasarana

Seiring dengan perkembangan, maka diharapkan terjadi peningkatan dalam sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta. Kondisi yang telah ada dirasa masih kurang memadai dengan sempurna



Sistematika Penyajian

➔ **BAB I**

Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi

➔ **BAB II**

Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

➔ **BAB III**

Akuntabilitas Kinerja

- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran

➔ **BAB IV**

Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN

Pengadilan Agama Yogyakarta



2025

RAPAT KERJA SIDANG PLENO 2



Senin, 13 Januari 2025

Renstra Tahun
2020-2024

Rencana Kerja
Tahun 2023

Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Agama Yogyakarta menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI

VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”

Misi

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
- Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tujuan

- Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
- Meningkatnya citra Lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sasaran Strategis

- Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
- Meningkatnya citra Lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS



Framework Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung

Misi

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tujuan 1

Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel

Tujuan 2

Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Tujuan 3

Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

Tujuan 4

Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional

Sasaran 1

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran 2

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran 3

- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
- Terlaksananya administrasi Kesekretariatan yang tertata dan lengkap

Sasaran 4

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Matrik Kinerja dan Pendanaan

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat dan atau pihak berperkara	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	92.69%	99%	98%	98%	6.796.515.000	9.584.979.000	9.584.736.000	9.794.694.000	9.660.808.000
					b.	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98.36%	-	98.50%	98.35%					
					c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99.13%	99.13%	99.13%	99.13%					
					d.	Survey responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	84	85	88	90					
2.	Terwujudnya pelayanan peradilan	Prosentase Penyelesaian Perkara sesuai dengan	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a.	Persentase Salinan putusan yang disampaikan	90%	100%	100%	100%	100%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.660.808.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	yang sederhana, cepat dan biaya ringan	prosedur pengadilan		Penyelesaian Perkara	para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi										
						15%	10%	6%	7 %	30%					
						100%	100%	100%	100%	100%	8.750.000	10.500.000	15.000.000	15.000.000	18.750.000
b.	Terwujudnya pelayanan pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	Persentase pelayanan pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	a. Prosentase perkara prodeo (Pembebasan Biaya Pekara) yang diselesaikan b. Prosentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	62.400.000	62.400.000	91.350.000	91.350.000	87.000.000
l.	Terciptanya tertib administrasi dan manajemen pengadilan yang efektif dan efisiensi	Persentase kelengkapan administrasi dan manajemen pengadilan	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	95%	98%	98%	98%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.660.808.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target						Alokasi (Juta Rupiah)			
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
i.	Meningkatnya kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	Persentase capaian kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	100%	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	a. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100%	100%	100%	100%	100%	6.796.515	9.584.979	9.584.736	9.794.694	9.794.694
					b. Persentase capaian kinerja Pajabat dan staf Kesekretariatan	100	100	100	100	100					

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<u>Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100% Jml Perkara yang diselesaikan Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<u>Jml Perkara tidak Mengajukan Banding</u> x 100% Jml Perkara yang diputus Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<u>Jml Perkara tidak Mengajukan Kasasi</u> x 100% Jml Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<u>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</u> Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<u>Jml Salinan Putusan disampaikan Tepat Waktu x 100%</u> Jml Putusan Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara Perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<u>Jml Perkara diselesaikan melalui Mediasi x 100%</u> Jml Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : - PERMANomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dan akta dan berhasil seluruhnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<u>Jml. Perkara Prodeo yang Diselesaikan</u> x 100% Jml Perkara yang diajukan secara Peodeo Catatan : - PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Difinisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembahasan biaya perkara - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeoyang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<u>Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum</u> x 100% Jml Permohonan Layanan Hukum Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultaasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Persentase Putusan Perkara Perdata dan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jml. Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jml Putusan Perkara Perdata yang diajukan Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan , perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcomes) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcomes yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya : sebagai wujud nyata komitmen instansi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta sebagai dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja antara Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding menetapkan 4 Indikator Kinerja Utama sesuai Tupoksi Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan ditahun yang sama Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta mengalami reviu diawal bulan Juli. Hal ini dikarenakan ada Indikator Kinerja yang tidak mencapai target dan ada pula yang realisasinya terlampau tinggi





REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 883/KPA.W12-A1/RA1.10/VII/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanjiakan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targetkinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaiankinerja dari perjanjianini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 01 Juli 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

NIP. 195007061989031001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H.

NIP. 19740926 199903 2 001

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**Nomor : 883/KP.W12-A1/RA1.10/VII/2024****PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	98.35%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99.13%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100%
		Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan	100%

Kegiatan

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran

Rp. 9.660.808.000

Rp. 105.750.000



Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.
NIP. 195007061989031001



Yogyakarta, 01 Juli 2024

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Khoiriyah Roihan, S. Ag., M. H.
NIP. 19740926 199903 2 001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Capaian Kinerja
Organisasi

Evaluasi dan Analisi
Capaian

Kinerja Realisasi
Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA ORAGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2024. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2024 dinyatakan “Berhasil”, karena pada lima sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu: sebesar

131,56%. Capaian untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”, sebesar 101,35%. Untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, sebesar 251,55%. Untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” sebesar 104,92%. Untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” sebesar 100%, dan untuk sasaran strategis “Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta” sebesar 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah berhasil mencapai target untuk semua sasaran strategis.

Capaian Kinerja tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	99,38%	101,40%	Melaksanakan persidangan sesuai dengan SOP dan meningkatkan kualitas SDM dengan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
	dan Akuntabel					mengikutsertakan Diklat ketenagateknisan.
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98,35%	98,40%	100,05%	Meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan mengikutsertakan hakim dalam berbagai Bimtek dan Diklat.
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,13%	99,38%	100,25%	Meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan mengikutsertakan hakim dalam berbagai Bimtek dan Diklat.
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	94,81%	105,34%	Melakukan survey kepuasan masyarakat dan survey indeks persepsi anti korupsi.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara dengan meningkatkan penggunaan aplikasi yang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
						mendukung percepatan penyelesaian perkara.
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	40,31%	134.37%	Sosialisasi peraturan yang mengatur tentang mediasi.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%	100%	100%	Sosialisasi hak dan kewajiban administrasi masyarakat miskin dan terpinggirkan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	109,84%	109,84%	Sosialisasi hak dan kewajiban administrasi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%	98.97%	100.98%	Sosialisasi jaminan, sita eksekusi dan orientasi penegakan hukum.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
5.	Peningkatan kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	Persentase capaian kinerja pejabat dan staf kepaniteraan.	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai Diklat dan Bimtek
		Persentase capaian kinerja pejabat dan staf kesekretariatan	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai Diklat dan Bimtek

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan Analisis Akuntabilitas Kinerja adalah untuk mengetahui efektifitas yang diukur dengan membandingkan realisasi target tahun sebelumnya dan produktifitas sasaran strategis. Adapun hasil analisis capaian pengukuran kinerja tersebut, diuraikan sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS : *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan Peradilan khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mengefektifkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 101,40% |
| 2. | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 100,05% |
| 3. | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 100,25% |
| | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 105,27% |

SASARAN 1, INDIKATOR 1

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan,

yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Pada tahun 2024 realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,38%, karena jumlah perkara yang putus sebanyak 812 perkara, dan sebanyak 807 perkara diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan.

Realisasi indikator ini cukup baik dan dapat melebihi target 98% sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 101,40%.

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{807 \text{ Perkara}}{812 \text{ Perkara}} \times 100\% = 99,38\%$$

Penyelesaian Perkara Tahun 2024

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Th. 2024	Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu Th. 2024	Realisasi Persentase Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu
Januari	80	80	100%
Februari	60	59	98,33%
Maret	70	70	100%
April	40	40	100%
Mei	53	53	100%
Juni	76	76	100%
Juli	70	68	99,08%
Agustus	62	61	98,38%
September	72	71	98,61%
Oktober	73	73	100%
November	76	76	100%
Desember	80	80	100%
Jumlah	812	807	99,38%

Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 101,40%. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 100,58%.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Sesuai data di tabel, setiap tahunnya realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu selalu mengalami

peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Agama Yogyakarta selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara.

Keberhasilan penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 101,40% dikarenakan proses penyelesaian perkara dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga terus dilakukan dengan mengikutsertakan Aparatur tenaga teknis dalam berbagai Diklat.

Tabel 6. Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun 2024	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	812	807	98%	99,38%	101,40%
	2023	842	830	98%	98.57%	100.58%
	2022	916	885	99%	99.44%	100.44%
	2021	952	924	92.69%	98.27%	106.02%
	2020	978	916	90%	92.69%	102.99%

SASARAN 1, INDIKATOR 2

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka

semakin puas masyarakat atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2024, sebagai berikut :

Upaya Hukum Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama dikarenakan ketidakpuasannya melalui Pengadilan Tinggi Agama. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta, Upaya Hukum Banding diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 13 perkara dari total 812 perkara yang diselesaikan. Sehingga, jumlah perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 sebanyak 799 perkara atau sebesar 98,40% dari perkara yang diselesaikan.

Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang putus.

$$\frac{\text{Jml Perkara Tidak Banding}}{\text{Jml Perkara Putus}} \times 100\%$$
$$\frac{799 \text{ Pkr Tidak Banding}}{812 \text{ Perkara Putus}} \times 100 = 98.40\%$$

Penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Yang Tidak Banding Tahun 2024	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2024	799	812	98.35%	98.40%	100.05%
	2023	832	842	98.50%	98.81%	100.31%
	2022	872	885	98.50%	98.53%	100.03%
	2021	908	924	98.36%	98.81%	100.46%
	2020	901	916	98%	98.36%	100.37%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2024 dikatakan baik karena melebihi target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan para pihak berperkara merasa puas dengan putusan Hakim, lebih dari itu Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dan

konsekuensi atas putusan yang telah dibacakan.

SASARAN 1, INDIKATOR 3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas masyarakat atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Upaya Hukum kasasi yang diajukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2024, sebagai berikut :

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya

Hukum Kasasi sebanyak 5 perkara dari total 812 perkara putus. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 sebanyak 807 perkara atau sebesar 99,38% dari target yang ditetapkan.

$$\frac{\text{Jml Perkara Tidak Kasasi}}{\text{Jml Perkara Putus}} \times 100\%$$

$$\frac{807 \text{ Perkara}}{812 \text{ Perkara}} \times 100 = 99,38\%$$

Penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Yang Tidak Kasasi Tahun 2024	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2024	807	812	99.13%	99.38%	100,25%
	2023	836	842	99.13%	99.29%	100.16%
	2022	879	885	99.13%	99.32%	100.19%
	2021	916	924	99.13%	99.13%	100%
	2020	901	916	98%	98.36%	100.37%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 dikatakan baik karena melampaui target yang ditentukan. Keberhasilan indikator ini dikarenakan

para pihak berperkara merasa puas dengan putusan Hakim, lebih dari itu Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dan konsekuensi atas putusan yang telah dibacakan.

SASARAN 1, INDIKATOR 4

Index Respon Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80

Tabel 9:
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2024	309	293	90%	94,81%	105,34%
2023	285	276	88%	96.66%	109.84%
2022	240	215	85%	89.46%	105.25%
2021	354	312	84%	88.12%	104.90%

Pada tahun 2024 dilakukan empat kali survei kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan pada Pengadilan Agama Yogyakarta yang tertuang dalam laporan survei kepuasan masyarakat Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024 pada setiap triwulan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I menunjukkan kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,8** atau konversi IKM 95%
 - b. Triwulan II menunjukkan kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,69** atau konversi IKM 92,25%
 - c. Triwulan III menunjukkan kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata

tertimbang IKM **3,79** atau konversi IKM 94,75%

- d. Triwulan IV menunjukkan kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,89** atau konversi IKM 97,25%

2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :

a. Triwulan I

- U5 : Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
- U7 : Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan dengan cepat

b. Triwulan II

- U3 : Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan.

c. Triwulan III

- U5 : Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

d. Triwulan IV

- U2 : Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini.
- U4 : Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan.
- U7 : Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon dengan cepat.

Realisasi tahun 2024 ini mencapai 94,75% dengan capaian 105,27%, realisasi tahun ini melebihi target. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam hal pelayanan publik. Sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diterima.



SASARAN STRATEGIS : *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dengan sederhana dan biaya ringan.

1. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu 100%
2. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 134.37%

SASARAN 2, INDIKATOR 1

Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja “Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah isi putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan/ diputus pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100% dari jumlah putusan yang berhasil diselesaikan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan

penyampaian salinan putusan dengan tepat waktu sebanyak 812 perkara dari total 812 perkara yang diselesaikan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan semua pihak hadir pada saat pembacaan putusan dan Jurusita menyampaikan amar putusan pada satu hari setelah putusan dibacakan.

$$\frac{\text{Jml isi putusan diterima tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{812 \text{ Perkara}}{812 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Putusan Disampaikan Tepat Waktu 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2024	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	2024	812	812	100%	100%	100%
	2024	842	842	100%	100%	100%
	2022	885	885	100%	100%	100%
	2021	908	924	100%	98.27%	98.27%
	2020	849	916	90%	92.69%	102.99%

SASARAN 2, INDIKATOR 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dengan Mediasi

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil dimediasi sehingga mengakibatkan dicabutnya perkara oleh pihak dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 30% dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan mediasi sebanyak 129 perkara dan yang berhasil didamaikan sebanyak 52 perkara atau sebesar 40,31% dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml Perkara selesai melalui Mediasi}}{\text{Jml Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{52 \text{ Perkara}}{129 \text{ Perkara}} \times 100\% = 40,31\%$$

Perkara Selesai Melalui Mediasi 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Selesai Melalui Mediasi Tahun 2024	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2024	52	129	30%	40,31%	134.37%
	2023	55	162	7%	33.95%	485%
	2022	11	176	6%	6.25%	104.17%
	2021	9	149	10%	6.04%	60.4%
	2020	16	191	15%	8.38%	55.87%

Capaian yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024

yaitu sebesar 134.37%, sering diadakan monitoring dan evaluasi terhadap

kinerja Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta kemudian memberikan

arahan kepada para Mediator tentang tips dan trik dalam melakukan mediasi.



SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dengan sederhana dan biaya ringan.

1. Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan 100%
2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 109.84%

SASARAN 3, INDIKATOR 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo/ pembebasan biaya perkara yang ditangani merupakan jumlah perkara masuk yang diajukan secara Pembebasan Biaya Perkara atau dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran berjalan. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 2024 sebesar 100% sesuai jumlah volume pada DIPA yaitu 30 perkara. Diharapkan target tersebut dapat mengoptimalkan

penyerapan DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran 2024. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 sejumlah 30 perkara dari target sebesar 30 perkara sehingga capaiannya di tahun 2024 sebesar 100%.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara prodeo/ Pembebasan Biaya Perkara yaitu sebanyak 30 perkara dari 30 perkara prodeo yang masuk, sehingga capaian Persentase penyelesaian perkara prodeo tepat waktu sebesar 100%. Hal ini

dikarenakan Pengadilan Agama Yogyakarta terus menerus melakukan sosialisasi tentang ketersediaan dana berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Sosialisasi tersebut dilakukan dilakukan secara langsung melalui meja informasi maupun media sosial Pengadilan Agama Yogyakarta

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

$$\frac{\text{Jml perkara prodeo diselesaikan}}{\text{Jml Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{30 \text{ Perkara}}{30 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 12. Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2024	Jumlah Perkara Prodeo	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Bebas Biaya Yang Ditangani	2024	30	30	100%	100%	100%
	2023	30	30	100%	100%	100%
	2022	30	30	100%	100%	100%
	2021	26	30	100%	86.67%	86.67%
	2020	14	25	100%	56%	56%

Keberhasilan target ini dikarenakan terus menerus dilakukan sosialisasi pendaftaran perkara secara prodeo baik

secara langsung melalui meja informasi maupun sosial media.

SASARAN 3, INDIKATOR 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin/masyarakat tidak mampu secara finansial) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) merupakan banyaknya masyarakat yang dilayani selama jam

layanan Pos Layanan Hukum sesuai dengan kontrak.

Pada tahun 2024, kontrak yang disepakati antara Pengadilan Agama Yogyakarta dan penyedia jasa layanan hukum selama 914 jam layanan dalam

satu tahun. Selama itu, Pos Layanan Hukum menangani sejumlah 1004 orang/pencari keadilan golongan tertentu.

Perbandingan Persentase jumlah masyarakat/ pencari keadilan golongan

tertentu yang dilayani oleh Pos Layanan Hukum di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Pencari Keadilan Mendapat Layanan Posbakum 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Pencari Keadilan yang Mendapat POSBAKUM	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2024	1004	914	100%	109,84%	109,84%
	2023	902	900	100%	100.22%	100.22%
	2022	955	900	100%	106.11%	106.11%
	2021	704	624	100%	112.82%	112.82%
	2020	711	624	100%	113.94%	113.94%

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi dan capaian jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan Posbakum dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml Pihak mendapat Posbakum}}{\text{Jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

$$\frac{1004 \text{ Pihak}}{914 \text{ Pihak}} \times 100\% = 109,84\%$$

Tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum sebanyak 914 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 1004 orang, maka realisasinya adalah sebesar 109,84% dan capaiannya 109,84%. Indikator ini dapat tercapai karena pengunjung yang datang ke Pangadilan Agama Yogyakarta meningkat.



SASARAN STRATEGIS : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan*

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan sehingga meminimalisir pengajuan upaya hukum banding.

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti 100.99% (dieksekusi)

SASARAN 4, INDIKATOR 1

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.

Kinerja Utama tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi), berikut adalah pencapaian target indikator tersebut pada tahun 2024 :

$$\frac{\text{Jml Putusan Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Diajukan Eksekusi}} \times 100\%$$

$$\frac{97 \text{ Perkara}}{98 \text{ Perkara}} \times 100\% = 98.97\%$$

Capaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara eksekusi dapat diselesaikan sesuai dengan tahapannya.



**SASARAN STRATEGIS : Peningkatan Kinerja Aparatur
Supporting Unit Pengadilan
Agama Yogyakarta**

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta, baik di Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan | 100% |
| 2. | Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan | 100% |

SASARAN 5, INDIKATOR 1

Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan

Kinerja utama tersebut dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai dengan jumlah pegawai yang berkinerja baik. Perhitungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kepaniteraan Berkinerja Baik}}{\text{Jumlah Pegawai Kepaniteraan}} \times 100\% =$$

$$\frac{34 \text{ Pegawai}}{34 \text{ Pegawai}} \times 100\% = 100\%$$

SASARAN 5, INDIKATOR 1

Persentase Capaian Kinerja Pejabat dan Staf Kesekretariatan

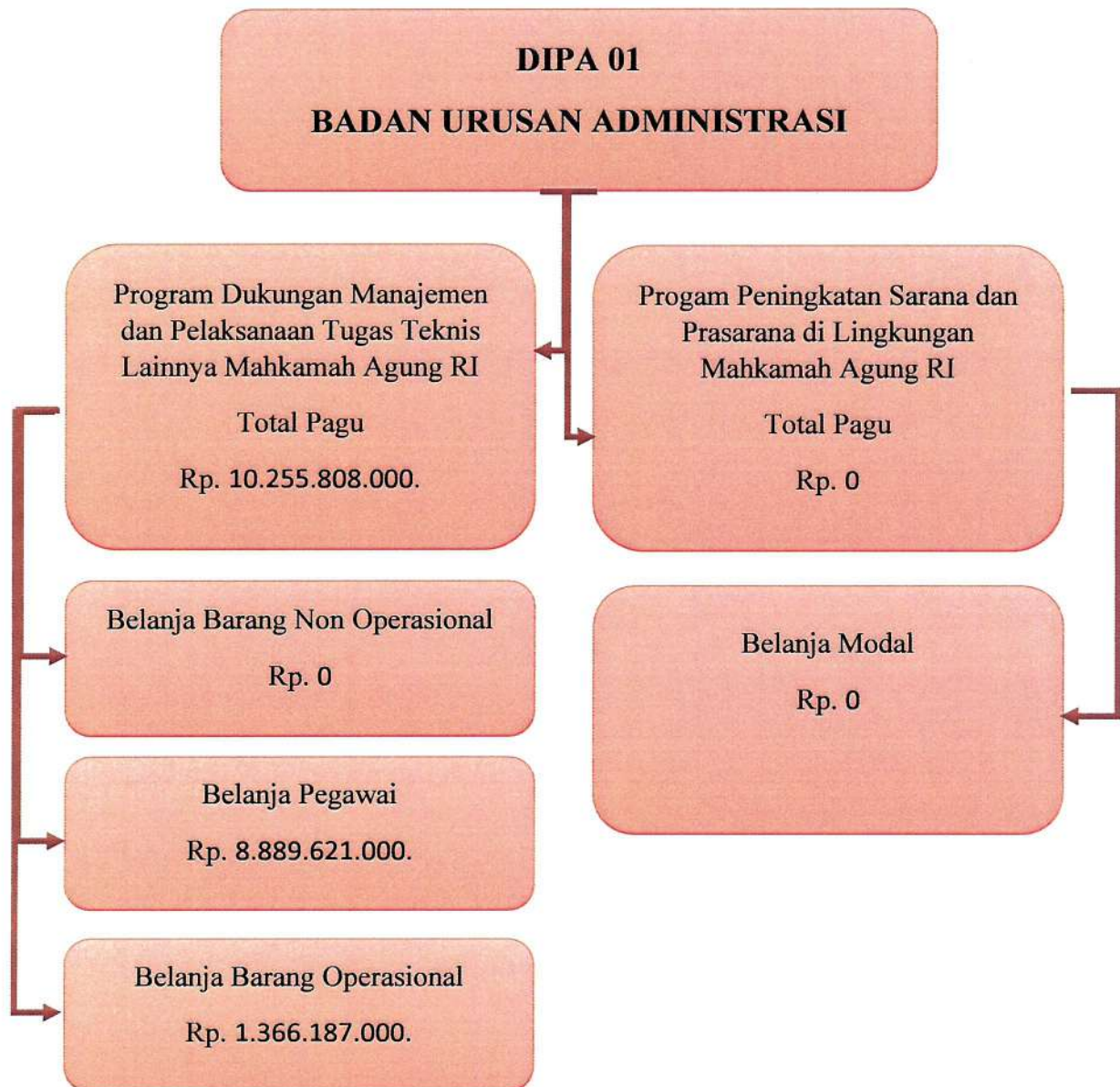
$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kesekretariatan Berkinerja Baik}}{\text{Jumlah Pegawai Kesekretariatan}} \times 100\% =$$

$$\frac{11 \text{ Pegawai}}{11 \text{ Pegawai}} \times 100\% = 100\%$$

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan adanya peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai Diklat dan Bimtek.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA Tahun 2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta terdiri dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama MARI) yang dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan program peningkatan manajemen peradilan agama yang terdiri dari percepatan penyelesaian perkara, biaya prodeo, sidang diluar gedung dan pos bantuan hukum, sebagai berikut:



1. Belanja Pegawai

Secara keseluruhan, anggaran belanja pegawai tahun 2024 berjumlah Rp. 8.889.621.000.- (delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

1. Realisasi anggaran belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2024 secara keseluruhan berjumlah Rp. 8,763,877,769,- (Delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan presentase sebesar 98.59 %.

2. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

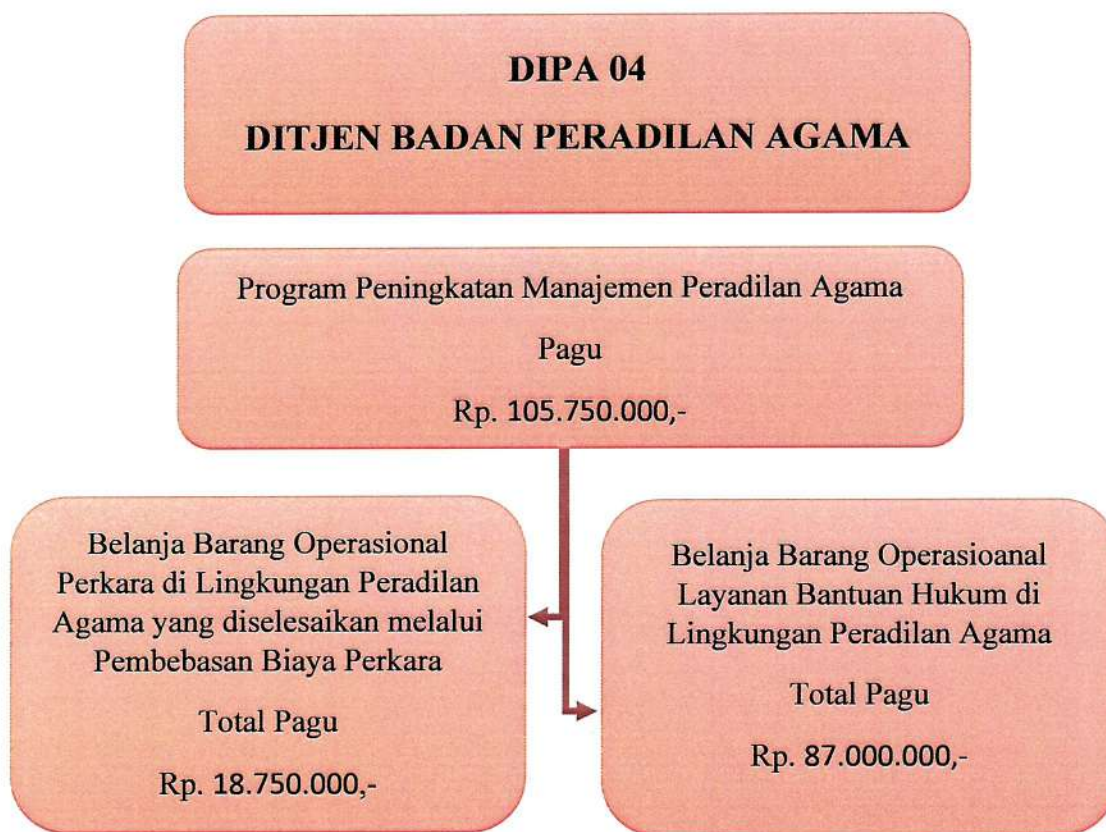
1. Anggaran Belanja Barang Operasional tahun 2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar **Rp. 1,366,187,000,-** (satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Anggaran Belanja Barang Operasional Non Operasional sebesar **Rp. 0** (nol rupiah).
2. Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran Belanja Barang Operasional terhitung sampai dengan bulan Desember 2024 secara keseluruhan berjumlah **Rp. 1,360,829,286,-** (satu miliar tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan persentase sebesar 99,61 %. Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran Belanja Barang Non Operasional terhitung sampai dengan Desember 2024 secara keseluruhan berjumlah **Rp. 0** (nol rupiah) dengan persentase sebesar 0 %.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin meliputi biaya pembelian perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan.

Secara keseluruhan anggaran belanja modal tahun 2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2024 secara keseluruhan berjumlah Rp. 0,- (nol rupiah) dengan persentase sebesar 0 %.



1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp. 105.750.000,- (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu **rupiah**). Anggaran tersebut terdiri dari Anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 87.000.000,- dan Pembebasan Biaya perkara sebesar Rp. 18.750.000,-.

Adapun Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum adalah sejumlah Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan persentase 100%. Pembebasan biaya perkara dengan realisasi sebesar Rp. 18,631,600,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) persentase 99,37 %.

Realisasi Anggaran Belanja (401199) Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran 01 Tahun 2024

No.	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	
1	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah				
1	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	0	0
TOTAL					
2	Gaji dan Tunjangan				
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3,234,167,000	3,233,663,720	99.98 %	503,280
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44,000	41,007	93.20 %	2,993
3	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	222,565,000	222,315,468	99.89 %	249,532
4	Belanja Tunj. Anak PNS	59,771,000	59,414,128	99.40 %	356,872
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	33,740,000	33,300,000	98.70 %	440,000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,002,190,000	4,002,190,000	100.00 %	0
7	Belanja Tunj. PPH PNS	671,222,000	635,718,366	94.71 %	35,503,634
8	Belanja Tunj. Beras PNS	136,223,000	135,715,080	99.63 %	507,920
9	Belanja Uang Makan PNS	492,904,000	405,195,000	82.21 %	87,709,000
10	Belanja Tunj. Umum PNS	36,795,000	36,325,000	98.72 %	470,000
TOTAL			8,763,877,769	98.59 %	125,743,231
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
A	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran				
1	Belanja Keperluan Kantor	386,981,000	380,391,747	98.30 %	6,589,253
2	Belanja Barang Persediaan barang konsumsi	35,328,000	35,316,900	99.97 %	11,100
B	Langganan Daya dan Jasa				
3	Belanja keperluan Perkantoran	198,000,000	198,000,000	100.00%	0
4	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	272,000	268,345	98.66 %	3,655
5	Belanja Langganan Telepon	1,110,000	1,109,585	99.96 %	415
6	Belanja Sewa	3,600,000	3,600,000	100	0
C	Pemeliharaan Kantor				
7	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	282,128,000	281,681,351	99.84 %	446,649
8	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,184,000	5,184,000	100 %	0
D	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167,753,000	162,872,065	97.09 %	4,880,935
E	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Satker				
10	Belanja Keperluan Perkantoran	22,700,000	22,700,000	100.00 %	0
11	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,400,000	46,200,000	91.64 %	4,212,000
F	Rapat Koordinasi Internal				
12	Belanja Barang Operasional Lainnya.	5,000	0	0	5,000
13	Belanja Perjalanan dinas biasa	3,000,000	2,800,000	93.33 %	200,000

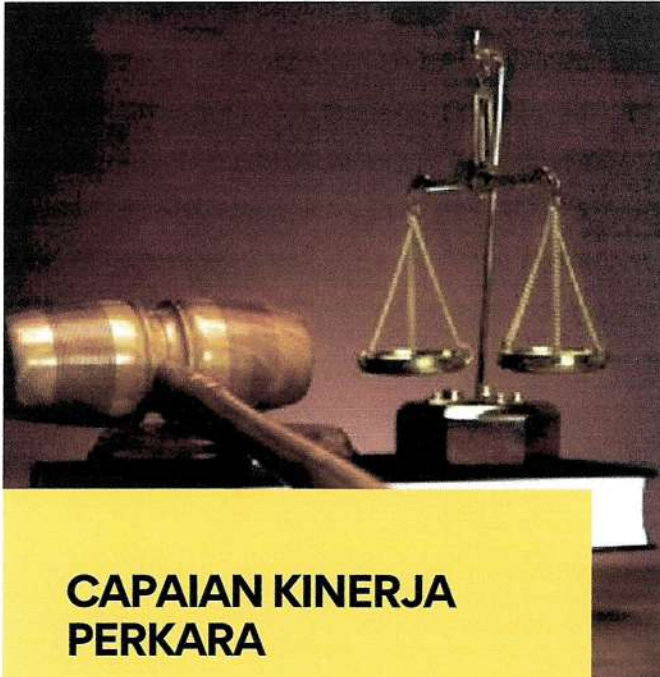
BAB IV PENUTUP



Kesimpulan

Rekomendasi

KESIMPULAN



CAPAIAN KINERJA PERKARA



Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.10.113.600.788,- (Sepuluh milyar seratus tiga belas juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 98.61%, dan anggaran dari DIPA (04) Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 105.631.600 (Serats lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 99.89%.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 104.75%, yaitu capaian Sasaran

- Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 101.76,
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 117.19%,
- Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan sebesar 104.92%,
- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebesar 102.04%,
- Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100%



CAPAIAN KINERJA KEUANGAN



Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.